

STRATEGI PEMANFAATAN KOMUNITAS LOKAL DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI PANTAI TEUPIN LAYEU IBOIH

Dian Aswita, Suleman Samuda, Nurlena Andalia

Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Serambi Mekkah
Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email: aswita_dian@yahoo.com

Abstrak

Ekowisata merupakan suatu perpaduan dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Pengembangan ekowisata yang berkelanjutan didasarkan pada perpaduan antara perspektif ekonomi dengan perspektif ekologi, dan masyarakat turut andil dalam terwujudnya hal tersebut. Ekowisata yang melibatkan masyarakat dalam segala aspek pengembangan dan pengelolaannya disebut dengan ekowisata berbasis masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Pantai Teupin Layeu Iboih Sabang. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *indepth interview*, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data kualitatif yang telah terkumpul kemudian diolah secara induktif menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) karena seluruh aktifitas ekowisata melibatkan masyarakat lokal baik sebagai pemilik (*local ownership*) ataupun sebagai pengelola dan pemandu wisata (*guide*), serta pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggungjawab mereka, termasuk penentuan biaya untuk wisatawan. Pemanfaatan komunitas lokal untuk pengelolaan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih yang berbasis *community-based ecotourism* diterapkan melalui strategi kemitraan dan kolaborasi.

Kata Kunci: *strategi pemanfaatan, komunitas lokal, ekowisata bahari*

Abstract

Ecotourism is a fusion of environmental, economic and social concerns. Sustainable ecotourism development is based on a combination of economic perspective with an ecological perspective, and society contributes to the realization of it. Ecotourism that involves the community in all aspects of development and management is called community-based ecotourism. The research was conducted at Teupin Layeu Iboih Beach, Sabang. The approach in this study used qualitative research methods. The data collected is descriptive, with a technique are *indepth interview*, observation, and documentation study. Qualitative data that have been collected then processed inductively by an interactive analysis model. The results show that the management of marine ecotourism in Teupin Layeu Iboih Beach is community-based ecotourism because all ecotourism activities involve local people, that as local ownership or as a manager and guide, as well as maintenance of tourism object becomes their responsibility, including the determination of fees for tourists. The empowerment of local communities for the management of marine ecotourism in Teupin Layeu Iboih Beach based on community-based ecotourism is implemented through partnership and collaboration strategies.

Keywords: *empowerment strategies, local community, marine ecotourism*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor unggulan pembangunan dan kesejahteraan, karena dengan meningkatnya destinasi akan berdampak pada peningkatan investasi wisata, dengan demikian pariwisata menjadi instrumen dalam memperoleh pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan

usaha dan infrastruktur. Pariwisata merupakan *leading sector* karena menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dan tercepat dalam menggerakkan sektor ekonomi. Namun, disisi lain dengan meningkatnya perjalanan wisatawan memberi efek negatif, yaitu adanya krisis global terkait lingkungan dan SDA-nya. Oleh karenanya, ekowisata kemudian

menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Ekowisata merupakan suatu perpaduan dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial.

The International Ecotourism Society (TIES) 1990, mendefinisikan ekowisata sebagai "*responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people*", dengan prinsip-prinsip kegiatan ekowisata tersebut adalah: (a) meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan; (b) membangun kesadaran dan rasa hormat terhadap lingkungan dan budaya; (c) memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan penduduk lokal; (d) memberikan keuntungan finansial langsung untuk konservasi; (e) memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal; dan (f) meningkatkan kepekaan terhadap iklim politik, lingkungan, dan sosial pada negara tuan rumah.

Prinsip-prinsip yang dijabarkan oleh TIES tersebut, secara jelas menerangkan bahwa masyarakat lokal perlu diberdayakan. Langkah awal untuk pelibatan masyarakat diawali dengan menyusun kebutuhannya, yang kemudian diakomodasikan di dalam rencana pengembangan ekowisata yang terencana dan berkelanjutan. Pengembangan ekowisata yang berkelanjutan didasarkan pada perpaduan antara perspektif ekonomi dengan perspektif ekologi, dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut. Ekowisata yang melibatkan masyarakat dalam segala aspek pengembangan dan pengelolaannya sering disebut dengan istilah ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*). Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009: 2), menyebutkan bahwa pola ekowisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Selain itu, dalam penelitian Masud, *et al.* (2017: 110-111), menyebutkan bahwa ekowisata berbasis

masyarakat membentuk dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat membuat sumber daya penting tersedia bagi masyarakat dalam memperbaiki taraf hidup mereka, untuk melindungi warisan alam dan budaya, serta memberi manfaat secara ekonomi bagi mereka.

Ekowisata berbasis masyarakat, dalam praktiknya melibatkan dan memberdayakan masyarakat tidak hanya sebatas mengelola sumberdaya yang ada sebagai lokasi dan objek wisata, akan tetapi juga mengedepankan kelestarian lingkungan (wisata tanpa merusak alam). Selain itu, ekowisata berbasis masyarakat juga tidak hanya dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan kehidupan yang ada didalamnya tetapi juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekowisata berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip keberlanjutan yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan. Hal ini dapat ditemui dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (konservasi lingkungan). Liu, *et al.* (2014: 190), dalam temuannya menunjukkan bahwa manfaat ekonomi memiliki dampak langsung pada perilaku pro-lingkungan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi strategi pemanfaatan komunitas lokal dalam menunjang pelaksanaan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Pantai Teupin Layeu Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, mulai dari bulan April - September 2016. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *indepth interview*, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang didapat dari wawancara terhadap komunitas lokal, tokoh adat dan masyarakat penyedia jasa dan layanan di lokasi wisata. Data sekunder didapat dari penelitian-penelitian terdahulu. Data kualitatif yang telah terkumpul kemudian diolah secara induktif

menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belakangan, terhitung sejak dekade tahun 1980-an adanya kecenderungan meningkatnya kesadaran akan kelangsungan lingkungan secara global. Dengan ada pergeseran kecenderungan tersebut berimbas pada pergeseran minat pariwisata dari pariwisata yang eksploitatif/konvensional/masal ke pariwisata berkelanjutan berbasis alam yang menempatkan alam dan budaya lokal sebagai asset utama pariwisata (Fandeli & Nurdin, 2005: 5). Pariwisata berkelanjutan ini sering disebut dengan istilah ekowisata. Ekowisata menjadi pilihan utama dalam pengembangan pariwisata, selain sebagai pelestarian lingkungan juga sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam pengelolaan ekowisata, masyarakat lokal dilibatkan secara penuh dalam berbagai aktifitas pengelolaan ekowisata. Pelibatan masyarakat lokal dimaksudkan untuk menyeleraskan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang karena pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan terkendali (Budiati, 2012: 133-134). Konsep ekowisata ini dapat kita temui di pantai Teupin Layeu Iboih Gampong Iboih yang menjadi salah satu destinasi pariwisata di Kota Sabang.

Pantai Teupin Layeu Iboih merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan saat berkunjung ke Kota Sabang. Karakteristik pantainya berpasir dan berkarang dengan kecerahan dan kejernihan perairannya berkisar dari 80-100%. Pantai ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan meskipun di beberapa titik tertentu, pinggir pantainya terdapat bebatuan yang sedikit terjal. Hal serupa telah dilaporkan oleh Aswita, Sarong, dan Sugianto (2015: 5-6), dimana "hasil pengukuran kecerahan diperoleh hasil 100% untuk wilayah pantai yang diteliti, hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi perairan masih dalam kondisi baik dan tidak ada pencemaran.

Secara umum material dasar perairan di sepanjang Pantai Teupin Layeu Iboih adalah berkarang, berpasir dan terdapat patahan-patahan karang akibat jangkar kapal dan terinjak oleh wisatawan pada saat berwisata. Tipe pantainya adalah berpasir, berkarang, adanya bebatuan, pada bagian-bagian tertentu di sepanjang pantai berkondisi sedikit terjal, sehingga tidak semua wilayah pantai sesuai untuk kegiatan rekreasi pantai". Selain itu, lokasi Pantai Teupin Layeu Iboih terletak berhadapan dengan Pulau Rubiah yang merupakan destinasi bagi wisatawan yang ingin melakukan *diving*, *snorkeling*, berperahu, dan renang. Hal ini yang kemudian juga menjadikan Pantai Teupin Layeu Iboih ini paling sering dikunjungi oleh wisatawan.

Potensi Ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih sangat menarik perhatian karena pengelolaan seluruh aktifitas dilandasi dengan hukum adat dimana ada pembagian zonasi pengaturan dan kewenangan serta masyarakat terlibat secara penuh dan aktif. Pelibatan masyarakat lebih ditujukan pada menumbuhkan perasaan *sense of belonging* dari masyarakat agar tetap menjaga kelestarian lingkungan. Aktifitas ekowisata bahari yang berorientasi di laut (*diving*, *snorkeling*, renang, berperahu dan transportasi menuju Pulau Rubiah) dikelola langsung oleh masyarakat dan tetap berada di bawah pengawasan ketua wisata (koordinator wisata) dan pejabat Gampong. Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi biota laut, konservasi terumbu karang, pemanfaatan SDA pesisir dan laut, serta kelestarian sekitar lokasi wisata dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinir oleh *panglima laot*, dan tidak luput dari pengawasan pejabat gampong. Aktifitas perekonomian seperti penyediaan *cottages*, *caffe*, rumah makan dan fasilitas pendukung lainnya, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan berada dalam pengawasan *Geucik* dan tokoh-tokoh masyarakat (*Tuha Peut*, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama).

Dalam upaya mengembangkan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih, sesuai dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan

ekowisata melibatkan masyarakat lokal. Keberadaan masyarakat lokal yang berhimpun dalam komunitas-komunitas lokal menjadi penting mengingat konsep dasar ekowisata yang diperkenalkan oleh From dalam Susilawati (2016) yakni mensyaratkan wisata ini mengutamakan penggunaan fasilitas yang diciptakan dan dikelola oleh masyarakat kawasan wisata, serta perjalanan wisata ini menaruh perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya lokal.

Fakta empiris menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih berbasis *community-based ecotourism* (ekowisata berbasis masyarakat) karena seluruh aktifitas ekowisata melibatkan masyarakat lokal baik sebagai pemilik (*local ownership*) ataupun sebagai pengelola dan pemandu wisata (*guide*), serta pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggungjawab mereka, termasuk penentuan biaya untuk wisatawan. Keseluruhan kegiatan tersebut tetap mendapat dukungan penuh oleh pemerintah gampong. *Community-based ecotourism* merupakan model pengembangan ekowisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pemilik, pengelola, dan pengawas seluruh aktifitas ekowisata bahari. Jadi dalam hal ini masyarakat lokal memiliki wewenang yang memadai untuk mengendalikan kegiatan ekowisata tersebut. Zeppel (2006: 20), menyebutkan bahwa *community-based ecotourism* yang sukses memerlukan pemberdayaan anggota masyarakat melalui partisipasi dan kontrol lokal terhadap pengambilan keputusan pariwisata, kesempatan kerja dan pelatihan serta peningkatan aktivitas kewiraswastaan oleh masyarakat setempat.

Selain itu, ada pula masyarakat yang secara individu menyediakan fasilitas wisata seperti rumah makan, *cottages*, *caffe*, swalayan, dan toko cendramata. Keseluruhan fasilitas tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Terlebih lagi, dalam pengelolaan ekowisata yang sifatnya musiman sering terjadi ketidaksamaan pendapatan bagi orang-orang yang dapat menimbulkan permasalahan (Wilkinson & Pratiwi, 1995 dalam Susilawati, 2016), untuk itu dalam

mengurangi terjadinya kesenjangan dalam pendapatan dari jasa penyewaan fasilitas untuk aktivitas wisata seperti berperahu dan penyewaan *snorkeling equipment*, maka dibuat aturan khusus dalam pengelolaannya melalui musyawarah gampong. Aturan ini berupa pembagian letak dan lapak berjualan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha penyewaan *snorkeling equipment* di pinggir pantai dan harga yang mereka tawarkan untuk seperangkat alat-alat tersebut adalah sama.

Dalam pemanfaatan komunitas lokal untuk pengelolaan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih yang berbasis *community-based ecotourism* diterapkan melalui strategi kemitraan dan kolaborasi. Hilirisasi dari strategi kemitraan dan kolaborasi dalam pengelolaan ekowisata hanya terjadi pada skala kegiatan yang bersifat insidental dan tidak diagendakan secara berkala dan berkelanjutan.

Kemitraan merupakan bentuk relasi sosial yang dibangun atas dasar *trust*, kemandirian dan kesetaraan dalam peran dan posisi untuk mencapai tujuan bersama. Inti dari kemitraan adalah pihak yang terlibat (*stakeholder*) saling berbagi kekuatan, tanggung jawab, dan capaian hasil. Relasi dalam kemitraan yang terbangun bertujuan untuk memperoleh kemanfaatan dan kepercayaan sehingga seluruh stakeholder dapat saling terhubung untuk menyelesaikan permasalahan bersama (United Nations, 2000: 5). Sebaliknya menurut Abdulsyani (1994) kolaborasi merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Proses dalam kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Kolaborasi dibangun atas dasar prinsip saling membesarkan, saling menghidupkan dan keberlanjutan serta keterbukaan diantara pihak yang terlibat. Gambaran dari strategi kemitraan dan kolaborasi yang tercipta di lingkungan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata bahari disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Strategi Kemitraan dan Kolaborasi Dalam Pemanfaatan Komunitas Lokal di Pantai Teupin Layeu Iboih

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	PARTISIPAN	STRATEGI
Transplantasi karang dan Zonasi Konservasi	<p>Transplantasi karang telah dilakukan sejak berpuluh tahun silam. Saat ini ada suatu peringatan yang disebut <i>Doden Day</i>, dimana kegiatan yang dilakukan adalah pelestarian lingkungan, membersihkan pantai dan pencangkakan terumbu karang. <i>Doden Day</i> tersebut digagas oleh keluarga dan anak-anak Pak Doden, dimana Pak Doden merupakan seorang tokoh yang sangat peduli tentang keberadaan terumbu karang dan ekosistem bawah laut. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat, lembaga adat, mahasiswa pecinta alam, organisasi selam kampus, dan pemerintah daerah (Data Hasil Penelitian, 2016; Tempo, 2015).</p> <p>Selain itu, kegiatan transplantasi karang yang dilakukan pada tahun 2015, dengan program yang bertema "<i>Save Our Littoral Life</i>" (SOLL), digagas oleh Marinir TNI-AL yang bekerja sama dengan KKP serta komponen lainnya seperti Basarnas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang. Program lainnya adalah pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi untuk mewujudkan ekosistem terumbu karang yang sehat. Pengelolaan ini dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan lembaga adat <i>Panglima Laot</i>. Program ini merupakan program KKP melalui Direktorat Jenderal KP3K di Pulau Weh, Sabang, yaitu membantu pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pesisir Timur Pulau Weh, Sabang dengan kategori Suaka Alam Perairan di Provinsi Aceh (Data Hasil Penelitian, 2016; Mustakim, 2015).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Kota Sabang • Perangkat Gampong • TNI AL • Masyarakat Setempat • Lembaga Adat • Komunitas Lokal • LSM Asing • LSM Lokal 	Kemitraan dan Kolaborasi

Aturan aktivitas wisata bahari	Pembuatan aturan aktifitas wisata bahari ditetapkan dalam musyawarah gampong dengan melibatkan seluruh stakeholder. Musyawarah gampong merupakan forum kolaborasi yang berfungsi untuk menetapkan aturan, menyelesaikan sengketa dalam aktifitas wisata bahari dan pengelolaan kawasan wisata (Data Hasil Penelitian, 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Setempat • Lembaga Adat • Komunitas Lokal • Perangkat Gampong 	Kolaborasi
Pengelolaan Sampah	<p>Pengelolaan sampah dikawasan wisata bahari ditetapkan berdasarkan aturan gampong. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan dampak sampah terhadap kelestarian lingkungan, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh komunitas lokal adalah <i>snorkeling</i> bersama masyarakat setempat (khususnya anak-anak dan pemuda) untuk melakukan pembersihan sampah di laut.</p> <p>Selain itu, terdapat pula aturan-aturan yang melarang membuang sampah sembarangan, dan bagi yang membuang sampah sembarangan akan diberikan denda dengan membayar sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, di beberapa titik terdapat tempat sampah yang telah disediakan di kawasan wisata tersebut (Data Hasil Penelitian, 2016).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Gampong • Lembaga Adat • Masyarakat Setempat • Komunitas Lokal 	Kolaborasi
Fasilitas untuk Aktivitas wisata (<i>Snorkling equipment & Diving equipment</i>)	Penyediaan fasilitas aktifitas wisata berupa alat-alat <i>snorkeling</i> dan <i>diving</i> serta perlengkapan renang dan memancing, dilakukan oleh komunitas dan individu. Khusus untuk alat <i>snorkeling</i> pengelolaannya dilakukan dengan cara kolaborasi meskipun pemiliknya adalah individu. Kolaborasi dalam penyediaan alat <i>snorkeling</i> terjadi ketika salah satu lapak kehabisan stok alat maka lapak yang lain akan membantu untuk menyediakan, kolaborasi juga terjadi pada skala penentuan harga sewa, dimana harga ditentukan merata, tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Gampong • Masyarakat Setempat • Lembaga Adat • Komunitas Lokal 	Kolaborasi

	ada yang lebih mahal ataupun lebih murah (Data Hasil Penelitian, 2016).		
Fasilitas Wisata (Restoran, <i>caffe</i> , penginapan dan <i>cottages</i>)	<p>Keberadaan fasilitas pendukung berupa restoran, <i>caffe</i>, penginapan dan <i>cottages</i>, sangat penting keberadaannya agar pengelolaan tetap memperhatikan dimensi pada keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat, secara umum tampak bahwa ada kisaran harga yang berlaku sama pada penginapat/hotel berdasarkan <i>type</i>, fasilitas pelengkap kamar dan letak kamar. Variasi harga pada menu makanan dan minuman yang ditawarkan juga tidak terlalu jauh berbeda (Data Hasil Penelitian, 2016).</p> <p>Selain itu, KKP melalui Direktorat Jenderal KP3K di Pulau Weh, Sabang, juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis pemanfaatan kawasan wisata bahari berupa pengelolaan <i>homestay</i> bagi masyarakat serta pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (Mustakim, 2015).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Kota Sabang • Perangkat Gampong • Masyarakat Setempat • Komunitas Lokal • Investor Asing 	Kemitraan & Kolaborasi
Transportasi wisata (perahu, <i>boat</i> kaca dan <i>speedboat</i>)	<p>Kepemilikan transportasi wisata adalah individu, namun dalam operasionalnya diterapkan sistem "bergilir/<i>giliran</i>" agar semua pemilik transportasi menerima manfaat ekonomi yang sama. Penentuan giliran perahu, <i>boat</i> kaca dan <i>speed boat</i> yang akan membawa wisatawan menuju pulau rubiah dan pulau-pulau lainnya diatur oleh penanggung jawab loket (Data Hasil Penelitian, 2016).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Gampong • Lembaga Adat • Masyarakat Setempat • Komunitas Lokal 	Kolaborasi

SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih merupakan *community-based ecotourism*. Seluruh aktifitas ekowisata melibatkan masyarakat lokal baik sebagai pemilik (*local ownership*) ataupun sebagai pengelola dan pemandu wisata (*guide*), serta pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggungjawab mereka, termasuk penentuan biaya untuk wisatawan. Pemanfaatan komunitas lokal diterapkan melalui strategi kemitraan dan kolaborasi.

Kemitraan merupakan bentuk relasi sosial yang dibangun atas dasar *trust*, kemandirian dan kesetaraan dalam peran dan posisi untuk mencapai tujuan bersama. Inti dari kemitraan adalah pihak yang terlibat (*stakeholder*) saling berbagi kekuatan, tanggung jawab, dan capaian hasil. Sedangkan, kolaborasi merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Proses dalam kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Community-based ecotourism dipandang penting dalam pengelolaan ekowisata bahari, terutama di Pantai Teupin Layeu Iboih. Masyarakat dipandang lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, lingkungan, dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam pengembangan ekowisata bahari, pemanfaatan masyarakat akan berkontribusi pada terciptanya kemandirian ekonomi dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara

Aswita, D., Sarong, M. A., Sugianto. 2015. Evaluasi Kesesuaian Perairan Pantai Teupin Layeu Iboih Sebagai Ekowisata Bahari. *Jurnal Penelitian Saintek*, Vol. 20, Nomor 1, April 2015.

- Budiati, L. 2012. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- Fandeli, Chafid, dan Nurdin, M. 2005. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*. Cetakan 1. Jogjakarta: Fakultas Kehutanan UGM, Pusat Studi Pariwisata UGM dan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Liu, J., Qu, H., Huang, D., Chen, G., Yue, X., Zhao, X., and Liang, Z. 2014. The Role of Social Capital in Encouraging Residents' Pro-Environmental Behaviors in Community-based Ecotourism. *Tourism Management*, 41(2014): 190-201, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2013.08.016>.
- Masud, M. M., Aldakhil, A. M., Nassani, A. A., and Azam, M. N. 2017. Community-based Ecotourism Management for Sustainable Development of Marine Protected Areas in Malaysia. *Ocean & Coastal Management*, 136(2017): 104-112, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.11.023>.
- Miles, M. B., and Huberman, A. M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Mustakim. 2015. KKP Bersama Marinir Tanam Terumbu Karang. *Harian Analisa*, 18 Agustus 2015, diakses tanggal 30 September 2017 pada laman <http://harian.analisadaily.com/aceh/news/kkp-bersama-marinir-tanam-terumbu-karang/162085/2015/08/18>.
- Susilawati. 2016. Pengembangan Ekowisata Sebagai Salah Satu Upaya Pemberdayaan Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Masyarakat. Diunduh tanggal 30 September 2017 pada laman <http://download.portalgaruda.org/articl>

e.php?article=436467&val=8426&title=PENGEMBANGAN%20EKOWISATA%20SEBAGAI%20SALAH%20SATU%20UPAYA%20PEMBERDAYAAN%20SOSIAL,%20BUDAYA%20DAN%20EKONOMI%20DI%20MASYARAKAT.

Tempo. 25 Januari 2015. Doden Day, Merayakan Pelestarian Terumbu Karang. diakses tanggal 30 September 2017 pada laman <http://indonesiana.tempo.co/read/30162/2015/01/25/Doden-Day--Merayakan-Pelestarian-Terumbu-Karang>.

The International Ecotourism Society. 1990. *Ecotourism Definition and Principles*. (Online), http://bsc.smebg.net/ecotourguide/best_practices/articles/files/TIES.pdf.

United Nations. 2000. *Building Partnerships for Good Governance*. New York: Department of Economic and Social Affairs Division for Public Economics and Public Administration.

Zeppel, H. D. 2006. *Indigenous Ecotourism: Sustainable Development and Management. Ecotourism Series, No. 3*. Wallingford: CABI Head Office.